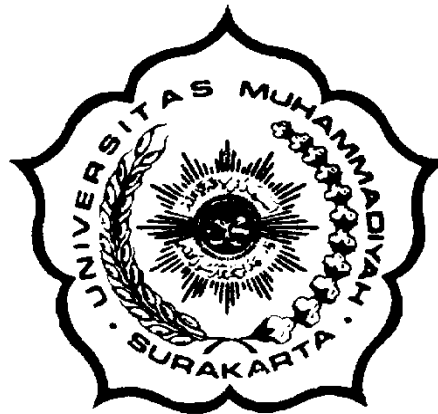


NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN (KONTRAK
KONTRUKSI) GEDUNG BANGSAL C&D RS. ORTOPEDI
DENGAN PT. BUMI MAS PERDANA



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
ENDANG PURWANTI
C 100 080 110

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Pembimbing Naskah Publikasi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardani, SH., SU)

Pembimbing II

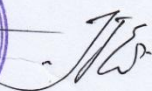


(Darsono, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : **Endang Purwanti**

NIM : **C 100 080 110**

Fakultas/ Jurusan : **Hukum**

Jenis : **Skripsi**

Judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK
KONTRUKSI) GEDUNG BANGSAL C&D RS.
ORTOPEDI (PROF. DR. R SOEHARSO)
SURAKARTA DENGAN PT. BUMI MAS
PERDANA.**

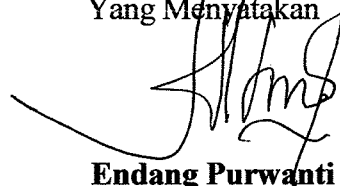
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Juli 2012

Yang Menyatakan



Endang Purwanti

Abstraksi

ENDANG PURWANTI : C100080110, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, Th 2012, Judul : “TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN (KONTRAK KONTRUKSI) GEDUNG BANGSAL C&D RS. ORTOPEDI DCENGAN PT. BUMI MAS PERDANA”

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar 1945, maka kegiatan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik memegang peranan yang peting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, hubungannya dengan asas adil dan merata sebagaimana salah satu asas pembangunan nasional. Perseroan Terbatas merupakan Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, PT. Bumi Mas Perdana sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di kota Temanggung, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan dengan pihak Negeri, sudah barang tentu kita lihat adanya hubungan hukum antara PT. Bumi Mas Perdana (pemborong) dengan pihak Negeri pemberi borongan pekerjaan. Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan..

Maka apa bila ada salah satu dalam pihak ada yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini Menyadari pentingnya penyelesaian masalah.. Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang Gambaram Umum Pembangunan Gedung Rumah sakit & Sejarah Rumah sakit Ortopedi (Prof. DR. R. Soeharso) Surakarta, Bagaimana Proses terjadinya perjanjian pemborongan (kontrak kontruksi) Gedung, Apa Hak dan Kewajiban Masing-masing pihak dalam Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kontruksi) Gedung Bangsal tersebut, Bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini, hukum di konsepskan sebagai norma-norma hukum atau aspek hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis Oleh karena pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundangan (tertulis) yang terkait dengan obyek yang di ketahui kedudukan hukum mengenai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Paket Pekerjaan Kontruksi: Pekerjaan Belanja Moda Gedung Dan Bangunan Berupa Pembangunan Gedung Bangsal Perawatan C dan D pada RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, Nomor : PL.01.02.6963 Tanggal : 12 Juli 2011. Para pihak dalam perjanjian pemborongan RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, ,Adapun sifat dalam perjanjian ini adalah kontrak kerja yang sifatnya kontrak kerja *lump sum* yaitu jenis kontrak kerja kontruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia jasa.

Kata kunci: Kontrak kontruksi, Perjanjian gedung RS.Ortopedi, Tanggung jawab hukum

Abstraction

Endang Purwanti: C100080110, Faculty of Law, UMS, Surakarta, Th 2012, Title: "LIABILITY LAW IN AGREEMENT chartering (CONSTRUCTION CONTRACT) BUILDING C & D Ward RS. Orthopedics (Prof. R.DR.Soeharso) WITH PT. MAS EARTH PRIME "

In order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the laws of 1945, the good development activities to developing physical and non physical hold of the significant role for the welfare of the people of Indonesia, its relationship with fundamental fairness and over as one of the cornerstones of national development. Company Limited is the legal body that is built upon the federal capital of the agreement, PT. Prime Mas earth as one enterprise which is engaged in construction services in the city Temanggung, in this case as one of the parties with respect to employment with the State of wholesale building, to be sure we see any legal relationship between the PT. Mas Earth Prime (wholesalers) with the State of wholesale provider of employment. The relationship between both parties is the law of relations litigation, until both sides have the same position and the position of the wholesale agreement ..

So what if there is one of the parties there is a default in the execution of this agreement chartering Recognizing the importance of problem solving .. In this case I will elaborate on Gambaram General Hospital Building & History Orthopaedic Hospital (Prof. DR. R. Soeharso) Surakarta, How does the process of chartering agreement (contract construction) building, what rights and obligations of each party to the Agreement chartering (Construction Contracts) Ward House is, How does the responsibility of each party in the chartering agreement (Construction Contracts) in this study the authors use the method because of the normative approach in this study, the law in konsepkan as legal norms or legal aspects of written and Therefore unwritten study by the legislation was limited to a (written) are associated with objects in the know about the legal position Contracting Agreement (Contract) Construction Work Package: Moda Shopping Building Works and Building Maintenance Form of Building C and D Ward at Orthopaedic Hospital Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, ID: PL.01.02.6963 Date: July 12, 2011. The parties in chartering agreement Orthopaedic Hospital Prof. DR. R. Soeharso Surakarta,, The nature of this agreement is a contract of employment that are lump sum contracts are the type of construction contract for completion of all work within the time limit specified by the number of definite and fixed price and any risks that might occur in the process of completion of the work is fully covered service providers.

Keywords: Construction contracts, building RS.Ortopedi chartering agreement, the legal responsibility

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN (KONTRAK
KONTRUKSI) GEDUNG BANGSAL C&D RS. ORTOPEDI
DENGAN PT. BUMI MAS PERDANA**

Oleh : Endang Purwanti (100 080 110)

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar 1945, maka kegiatan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik memegang peranan yang peting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat..“Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 adalah Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025”.¹

Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

¹ Undang-Undang Nomer 17 tahun 2007 tentang *pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025*

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.² PT. Bumi Mas Perdana sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di kota Temanggung, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan dengan pihak Negeri RS, Ortopedi, Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Bumi Mas Perdana dengan pihak pemberi pekerjaan tersebut, selama ini berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perbedaan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Permasalahan yang sering timbul menyangkut masalah batas waktu penyelesaian kontrak, dimana pihak pemborong yaitu PT. Bumi Mas Perdana belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka hal tersebut akan menghambat penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu permasalahan juga dapat timbul dari pihak pemberi pekerjaan pemborongan bangunan yaitu RS. Ortopedi menyangkut penyelesaian pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama pada perjanjian pemborongan bangunan yang telah selesai dikerjakan semua dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperoleh atau

² Undang-undang nomor 40 tahun 2007 *tentang perseroan terbatas*.

diperjanjikan. Hal ini amat mungkin terjadi karena pekerjaan pemborongan bangunan terkadang kontrak yang dibuat, bentuk dan isinya tidak sesuai dengan standar pembuatan kontrak, dan dalam pelaksanaannyapun tidak terlepas adanya kemungkinan cidera janji (wanprestasi).³

Menyadari pentingnya penyelesaian masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut tentang: Bagaimana Proses Terjadinya pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan Gedung Bangsal C&D antara Rs. Ortopedi (Prof. Soeharso) Surakarta dengan PT. Bumi Mas Perdana, Apa Hak dan Kewajiban Masing-masing pihak dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Bangsal tersebut, Bagaimanakah Tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan Gedung Bangsal C&D tersebut, Apa bila salah satu pihak melakukan kesalahan,

Adapun tujuannya Untuk mengetahui Proses Terjadinya pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan Gedung Bangsal C&D antara Rs. Ortopedi (Prof. Soeharso) Surakarta dengan PT. Bumi Mas Perdana. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Masing-masing pihak dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Bangsal tersebut. Dan untuk mengetahui Tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan Gedung Bangsal tersebut apabila ada salah satu pihak melakukan kesalahan. Dan manfaat Bagi Penulis: memahami mengenai kedudukan dan tanggung jawab para pihak mengetahui hambatan-hambatan dan juga cara

³ H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003. hal.245

penyelesaiannya, Bagi Masyarakat :bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, dalam hal perjanjian pemborongan bangunan menguntungkan kedua belah pihak dengan kata lain tidak berat . Bagi ilmu pengetahuan :Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan tanggung jawab hukum.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini, hukum di konsepskan sebagai norma-norma hukum atau aspek hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jenis penelitian deskriptif, karena bermaksud menggambarkan isi kontrak konstruksi terdapat dalam Surat perjanjian pemborongan bangunan Gedung Bangsal C&D antara Rs. Ortopedi (Prof. Soeharso Surakarta dengan PT. Bumi Mas Perdana, Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan sumber data berikut: Penelitian kepustakaan Bahan primer dan Bahan sekunder Penelitian lapangan, Sesuai dengan metode dengan metode pendekatan yang digunakan maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam tahapan ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum atau peraturan perundang-undangan, doktrin, yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemborongan, kemudian data yang di hasilkan diinventarisasikan dengan data yang telah di peroleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh.

B. Gambaran Umum Pembangunan Gedung Rumah sakit & Rumah sakit

Ortopedi Prof. DR. Soeharso

Sebagai lembaga kesehatan, Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. Soeharso Surakarta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam pnyembuhan penyakitnya maupun penanganan yang membutuhkan kesiapan yang mendadak. Sejak berdirinya di tahun 1951 dengan nama Balai Pembangunan Penderita Cacat (Rehabilitasi *Centrum*) yang pertama di Indonesia. Dengan terbitnya SK Menteri Sosial RI Nomor 55/HUK/2003, tanggal 23 Juli 2008 nama PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta diubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta sampai sekarang⁴.

Banyaknya pasien yang datang ke Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. Soeharso Surakarta ini, perlu adanya pembangunan sarana maupun pengadaan prasarana yang memadai. Kurangnya bangsal bagi pasien rawat inap mendasari pembangunan Bangsal C&D Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. Soeharso dengan bangunan yang cukup luas dan terdiri dari 2 lantai, dapat menyelesaikan masalah kekurangan tempat di atas. Tujuan dan manfaat Pembangunan gedung rumah sakit Ortopedi Menyediakan bangsal perawatan rawat inap dimana sekarang Rumah Sakit Ortopedi kekurangan tempat bagi pasien yang diharuskan menjalani pengobatan secara berkala. Disamping itu pula memberikan tempat yang nyaman dan berarsitektur tinggi kepada pasien yang berkunjung ke rumah sakit Ortopedi. Pasien mendapatkan tempat yang

⁴ Arsip dokumentasi RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta

nyaman dan luas apabila diharuskan menginap dan tidak perlu meminjam tempat seperti sebelum dibangunnya bangsal C&D ini.

C. Proses pelaksanaan perjanjian Pemborongan (Kontrak Kontruksi) RS. Ortopedi (Prof. DR. R Soeharso) Surakarta dengan PT Bumi Mas Perdana.

Proses sebelum terjadinya perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) Gedung Bangsal RS. Ortopedi dengan PT. Bumi Mas Perdana diawali dengan adanya pengumuman lelang. Hasil evaluasi dari penawaran lelang, kemudian diumumkan pemenang lelang. Pemenang yang ditetapkan untuk mengerjakan pembangunan Gedung Bangsal Perawatan C dan D tersebut, RS. Ortopedi diantaranya adalah PT. Bumi Mas Perdana, PT. Widya Satria, dan PT. Delima Kreasi Nusa. Namun Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, pemenang lelang merupakan penawar terendah. Namun tidak semua pemborong dengan penawaran terendah yang memenangkan proses tender. Hal ini didasarkan pihak pemberi pekerjaan borongan (*bouwher*) melihat harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar dan juga untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan. Jadi proses hasil pelelangan yang memenuhi standart untuk memborong pembangunan gedung bangsal C&D RS. Ortopedi ialah PT. Bumi Mas Perdana.

Sebelum terjadinya penandatanganan perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) gedung bangsal C & D RS. Ortopedi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemborong atau penyedia jasa antara lain PT. Bumi Mas Perdana merupakan Badan Usaha, Warga Negara

Indonesia (WNI). Dibuktikan dari KTP asli Direktur PT. Bumi Mas Perdana yaitu R. Sukarno dengan pihak satunya ialah RS. Ortopedi Surakarta yang diwakili oleh Dra. Nining setyawati, M. Si Memenuhi kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian pemborongan senilai Rp. 8.112.811.000,- (Delapan Milyar Seratus Dua belas juta Delapan Ratus sebelas ribu Rupiah). Bahwa, perjanjian pemborongan ini disebut dengan perjanjian kontrak kerja *lump sum*, adakalanya undang-undang mensyaratkan, disamping sepakat juga menuangkan perjanjian dalam satu bentuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap atau disertai dengan formulitas tertentu. Sehingga perjanjian ini disebut dengan perjanjian kontrak kerja *lump sum*.

Dalam hal tersebut pihak yang membuat perjanjian adalah PT. Bumi Mas Perdana yang bebas membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan oleh PT. Bumi Mas Perdana tidak boleh merugikan bagi pihak RS. Ortopedi. Bahwa kesepakatan ini terjadi apabila RS. Ortopedi atau pihak pengguna Anggaran setuju dengan isi draft yang dibuat oleh PT. Bumi Mas Perdana menandatangani draft perjanjian tersebut. Apabila semua pihak yaitu RS. Ortopedi dengan PT Bumi Mas Perdana sudah menandatangani perjanjian tersebut maka perjanjian dianggap sah. Dalam hal ini PT. Bumi Mas Perdana telah menandatangani perjanjian maka berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan

dalam kontrak. RS. Ortopedi atau Pengguna Anggaran berkewajiban melakukan pembayaran pada PT. Bumi Mas Perdana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan tersebut dilakukan, maka masing-masing pihak yaitu pihak RS. Ortopedi atau Pengguna Anggaran dengan PT. Bumi Mas Perdana harus melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

D. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) gedung bangsal

Setelah masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan gedung di Rs. Ortopedi menandatangani surat perjanjian pemborongan, berarti tercapailah kesepakatan bersama. Hak dari penyedia jasa adalah mendapatkan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Maka pihak pengguna Anggaran wajib memberikan hak pembayaran kepada penyedia jasa. Maka kewajiban dari pengguna Anggaran adalah membayarkan sejumlah harga yang telah disepakati tersebut. Selain itu masih banyak hak dan kewajiban lainnya yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian diatas.

Dengan demikian mengenai hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang antara para pihak. Apabila salah satu melakukan kesalahan atau pelanggaran maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Sesuai hukum perjanjian, pihak yang melakukan wanprestasi tersebut haruslah dimintai tanggung jawab hukumnya sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang

ada. Begitu juga yang terjadi dalam perjanjian pemborongan gedung di Rs. Ortopedi.

E. Tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) gedung bangsal

Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak telah melakukan kelalaian, tanggung jawab tersebut dapat di dasarkan atas :

a. Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi

Terlambat memenuhi prestasi dalam hal ini adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan maka di kenakan denda.

b. Tanggung jawab hukum yang berdasarkan atas perbuatan melawan hukum

Penyedia jasa memasukan data-data dan atau keterangan dan atau informasi lainnya dan atau penyedia jasa memasukan hasil laporan pekerjaan dan atau memberikan keterangan palsu untuk melaporkan hasil pekerjaan tidak sesuai hasil kesepakatan kedua belah pihak. Maka penyedia jasa melanggar peraturan, iktikad baik dan lain sebagainya. berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka pihak penyedia jasa harus mengganti kerugian yang dialami oleh Pengguna Anggaran.

c. Ganti Kerugian

Apabila PT. Bumi Mas Perdana tidak mau membayar denda setiap keterlambatan yang di lakukan maka perdamainlah yang terjadi tapi apabila PT Bumi Mas tidak mau membayar denda sesuai dengan kesepakatan maka Penyedia jasa dikatakan melakukan wanprestasi oleh pihak pengguna Anggaran.

Disini apabila penyedia Jasa belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya maka penyedia jasa wajib membayar denda besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Apabila peneydia jasa tidak mau menyelesaikan pekerjaan dan tidak mau membayar denda yang telah di sepakti bersama maka penyelesaian perselesaian akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan seadainya perselesaian tidak dapat di selesaikan dengan cara tersebut maka akan di selesaikan dengan cara mediasi atau konsialiasi atau Arbitrase.

F. Penutup

A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) Gedung Bangsal RS. Ortopedi (Prof. DR. R. Soeharso) dengan PT Bumi Mas Perdana
 - a. Proses sebelum terjadinya perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) Gedung Bangsal RS. Ortopedi dengan PT. Bumi Mas Perdana diawali dengan adanya pengumuman lelang. hasil pelelangan yang memenuhi standart Ortopedi ialah PT. Bumi Mas Perdana.
 - b. Sebelum terjadinya penandatanganan perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) syarat oleh calon pemborong atau penyedia jasa antara lain PT. Bumi Mas Perdana merupakan Badan Usaha, Warga Negara Indonesia (WNI). Dibuktikan dari KTP asli Direktur PT. Bumi Mas Perdana yaitu R.

Sukarno dengan pihak satunya ialah RS. Ortopedi Surakarta yang diwakili oleh Dra. Nining setyawati, M. Si

- c. Bahwa, perjanjian pemborongan ini disebut dengan perjanjian kontrak kerja *lump sum*, perjanjian dalam satu bentuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap.
 - d. Bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah PT. Bumi Mas Perdana yang bebas membuat ketentuan yang tercantum dalam perjanjian asalkan tidak bertentangan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan,
 - e. Anggaran setuju dengan isi draft yang dibuat oleh PT. Bumi Mas Perdana menandatangani draft perjanjian tersebut. Apabila semua pihak yaitu RS. Ortopedi dengan PT Bumi Mas Perdana sudah menandatangani perjanjian tersebut maka perjanjian dianggap sah.
2. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) gedung bangsal

Hak dari penyedia jasa adalah mendapatkan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak Maka pihak pengguna Anggaran wajib memberikan hak pembayaran kepada penyedia jasa. Maka kewajiban dari pengguna Anggran adalah membayarkan sejumlah harga yang telah di sepakati tersebut.

3. Tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan (Kontrak Kontruksi) gedung bangsal

Terlambat memenuhi prestasi dalam hal ini adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal apabila mengalami

keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan maka borong akan dikenakan denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak keterlambatan tersebut. Hal ini berdasarkan musyawarah apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah maka Pengguna Anggaran dapat menyelesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

B. Saran

1. Hendaknya ikatan yang terjadi dalam perjanjian yang telah disepakati menjadi acuan bagi para pihak untuk melaksanakan tugasnya menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Hendaknya kontraktor, dalam hal ini PT Bumi Mas melaksanakan pengerjaan borongan tidak melakukan manipulasi laporan yang dapat melanggar kesepakatan perjanjian seperti mengurangi kualitas bahan dan pengerjaan.
3. Hendaknya peran pengawasan dan evaluasi pengerjaan borongan yang menjadi tanggung jawab RS. Ortopedi benar-benar dilakukan secara obyektif, dan tidak menimbulkan keterpurukan kualitas bangunan yang diharapkan rumah sakit

Daftar Pustaka

1. Buku

Yasin,H. Nazarkhan Yasin.2003. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*,
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Arsip dokumentasi RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomer 17 tahun 2007 tentang *pembangunan jangka
panjang nasional 2005-2025*

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 *tentang perseroan terbatas*